

Dana BOSP sebagai Instrumen Pemberdayaan Literasi Kewargaan di Pendidikan Nonformal (Studi Kasus di PKBM Provinsi Jawa Timur)

Adea¹, Syukran², Vivi Resti Darmison³, Herda Arni⁴, Aan Ansori⁵

Universitas Islam Syekh Yusuf, Indonesia

2407010233@students.unis.ac.id¹, 2407010229@students.unis.ac.id²,
2407010226@students.unis.ac.id³, 2407010109@students.unis.ac.id⁴,
2407010271@students.unis.ac.id⁵

Submitted: 27th July 2025 | **Edited:** 25th August 2025 | **Issued:** 01st September 2025

Cited on: Adea, A., Syukran, S., Darmison, V. R., Arni, H., & Ansori, A. (2025). Dana BOSP sebagai Instrumen Pemberdayaan Literasi Kewargaan di Pendidikan Nonformal (Studi Kasus di PKBM Provinsi Jawa Timur). *AKADEMIK: Jurnal Mahasiswa Humanis*, 5(3), 1523-1535.

ABSTRACT

Community Learning Centers (PKBM) in East Java play a crucial role in expanding access to non-formal education and fostering civic engagement. However, the implementation of the Operational Assistance for Education Units (BOSP) faces persistent challenges, including limited tutor capacity, low community participation, and insufficient financial transparency. This study aims to analyze how BOSP funds can be optimized to strengthen civic literacy in PKBM. Using a descriptive qualitative approach, data were collected through interviews, participatory observations, and document analysis in four PKBM located in Malang, Sidoarjo, Banyuwangi, and Jember. The findings reveal that BOSP funds have been effectively utilized for tutor training, development of contextual learning materials, and participatory activities such as village democracy training and election simulations. These initiatives have enhanced learners' civic awareness and social participation. In addition, transparent financial practices such as public reporting and open forums have increased institutional accountability and community trust. Nevertheless, delays in fund disbursement and managerial limitations remain as key obstacles. Strengthening collaboration between government, PKBM, and local communities is recommended to ensure that BOSP becomes a sustainable instrument for inclusive and participatory civic education.

Keywords: BOSP, Non-Formal Education, PKBM, Civic Literacy, Community Participation

PENDAHULUAN

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan lembaga pendidikan nonformal yang memiliki peran strategis dalam memberikan akses pendidikan bagi masyarakat marginal, seperti warga belajar pendidikan kesetaraan, perempuan dewasa, dan pekerja informal. Di Jawa Timur, PKBM tidak hanya berfungsi sebagai pusat pembelajaran, tetapi juga sebagai ruang penguatan nilai-nilai kewargaan dan partisipasi

sosial berbasis komunitas (Hoskins & Kerr, 2021). Melalui pendekatan partisipatif, PKBM berpotensi membentuk warga yang kritis, reflektif, dan aktif dalam kehidupan demokratis (Biesta, 2020).

Salah satu bentuk dukungan negara bagi keberlangsungan PKBM adalah melalui skema Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), yang bertujuan mendorong kemandirian kelembagaan dan meningkatkan mutu layanan pendidikan (Kemendikbudristek, 2023). Dana BOSP memberikan fleksibilitas bagi lembaga nonformal untuk mengembangkan program sesuai kebutuhan lokal (Psacharopoulos & Patrinos, 2020). Namun, implementasi di lapangan tidak lepas dari kendala, seperti keterbatasan kapasitas tutor, rendahnya partisipasi masyarakat, serta lemahnya transparansi pengelolaan dana (Supriyanto & Rachmawati, 2021; Rahman & Sulastri, 2021).

Hasil studi UNESCO Institute for Lifelong Learning (2022) menegaskan bahwa efektivitas dana publik sangat dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat dan keterbukaan pengelolaan keuangan. Jika dana pendidikan tidak dikelola secara partisipatif, potensi pembelajaran berbasis komunitas dalam membangun kesadaran kritis akan melemah. Hal ini sejalan dengan pandangan Hartono dan Azizah (2022) yang menekankan perlunya literasi kewargaan yang kontekstual dan relevan dengan isu-isu lokal.

Meskipun beberapa PKBM di Jawa Timur, seperti di Malang dan Banyuwangi, menunjukkan praktik baik melalui program literasi kewargaan, permasalahan mendasar terkait akuntabilitas, pelibatan masyarakat, serta kapasitas kelembagaan masih menjadi hambatan (Wulandari & Firmansyah, 2022; Hill & Varghese, 2022). Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) karena kajian terdahulu lebih banyak berfokus pada aspek administratif pengelolaan BOSP, sementara analisis tentang bagaimana optimalisasi dana tersebut dapat meningkatkan literasi kewargaan di PKBM masih terbatas.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana pemanfaatan BOSP dapat mendukung literasi kewargaan di PKBM Jawa Timur, sekaligus mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam memperkuat konsep pemberdayaan berbasis komunitas serta kontribusi praktis bagi

penguatan kebijakan pendidikan nonformal yang partisipatif, inklusif, dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Dana BOSP dan Pembiayaan Pendidikan Nonformal

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) memberikan keleluasaan bagi lembaga pendidikan nonformal untuk merancang program sesuai kebutuhan lokal. Studi terbaru menunjukkan bahwa fleksibilitas ini dapat meningkatkan efektivitas layanan pendidikan apabila diimbangi dengan tata kelola keuangan yang transparan dan partisipatif (Mulyani & Hidayat, 2021). Menurut Nugroho dan Yuniarti (2022), dukungan finansial seperti BOSP mampu memperkuat daya saing lembaga nonformal jika pengelolaannya diarahkan pada pengembangan kapasitas kelembagaan dan peningkatan mutu tutor.

Selain itu, kajian Kurniawan (2023) menegaskan bahwa efektivitas dana pendidikan tidak hanya ditentukan oleh besarnya, tetapi juga oleh sejauh mana dana tersebut diarahkan pada program prioritas berbasis kebutuhan warga belajar. Dengan demikian, BOSP dalam konteks PKBM harus dipahami sebagai instrumen strategis, bukan sekadar administratif, dalam memperkuat fungsi pendidikan masyarakat.

Literasi Kewargaan sebagai Bagian Pendidikan Masyarakat

Literasi kewargaan mencakup pemahaman hak dan kewajiban, partisipasi sosial, serta kemampuan kritis menghadapi isu publik. Pendidikan nonformal dapat berperan sebagai arena strategis untuk membangun literasi ini, terutama jika kurikulumnya dirancang berbasis konteks lokal (Prasetyo & Anisa, 2020). Studi Rahayu (2022) menunjukkan bahwa pembelajaran kewargaan yang menekankan isu aktual, seperti toleransi dan etika digital, lebih efektif dalam membentuk kesadaran kritis warga belajar.

Menurut Widodo dan Astuti (2021), literasi kewargaan dalam PKBM harus dipadukan dengan pendekatan multikultural untuk mengatasi keragaman sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Fauzi (2023) bahwa pendidikan kewargaan berbasis komunitas mampu meningkatkan solidaritas sosial dan mencegah fragmentasi di masyarakat. Oleh karena itu, literasi kewargaan di PKBM tidak hanya sebatas transfer pengetahuan,

melainkan proses pemberdayaan sosial yang menyiapkan warga menjadi aktor aktif dalam demokrasi.

Pemberdayaan dan Kolaborasi Komunitas

Konsep pemberdayaan menekankan pentingnya keterlibatan aktif komunitas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks pendidikan nonformal, hal ini berarti warga belajar perlu dilibatkan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program (Siregar & Lubis, 2020). Menurut Utami (2021), partisipasi komunitas menciptakan rasa kepemilikan terhadap program pendidikan dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan.

Selain itu, studi Handayani (2022) menegaskan bahwa tata kelola partisipatif memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan nonformal. Dalam kerangka empowerment, kolaborasi multipihak antara pemerintah, pengelola PKBM, dan komunitas lokal menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang berkelanjutan (Putri & Darmawan, 2023). Dengan demikian, teori pemberdayaan memberikan dasar konseptual bahwa pengelolaan BOSP harus diarahkan pada distribusi kekuasaan yang lebih merata, sehingga dana publik benar-benar menjadi sarana penguatan masyarakat.

Kerangka Konseptual

Berdasarkan teori di atas, dapat disusun kerangka konseptual bahwa pemanfaatan BOSP (sebagai instrumen finansial) akan berkontribusi pada peningkatan literasi kewargaan apabila dikelola melalui prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Faktor pemberdayaan komunitas menjadi mediator penting yang menghubungkan tata kelola dana dengan dampak pendidikan kewargaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis praktik pengelolaan dana BOSP dalam program literasi kewargaan di PKBM wilayah Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pengalaman, dan persepsi para aktor pendidikan nonformal secara mendalam (Creswell & Poth, 2019). Lokasi penelitian ditentukan secara purposive pada empat PKBM di Kota Malang, Sidoarjo, Banyuwangi, dan Jember yang aktif menyelenggarakan kegiatan literasi kewargaan serta menerima dana BOSP tahun anggaran 2023.

Informan penelitian dipilih secara purposive berdasarkan keterlibatan langsung mereka dalam pengelolaan dana dan program kewargaan. Informan terdiri dari 4 kepala PKBM, 8 tutor utama, serta 12 warga belajar yang aktif dalam forum musyawarah dan kegiatan kewargaan, sehingga total informan berjumlah 24 orang. Pemilihan jumlah ini dianggap memadai untuk memperoleh variasi perspektif dan kedalaman informasi (Guest, Namey, & Chen, 2020).

Teknik pengumpulan data meliputi: wawancara mendalam dengan kepala PKBM, tutor, dan warga belajar, observasi partisipatif terhadap kegiatan literasi kewargaan, dan analisis dokumen berupa Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), laporan keuangan BOSP, serta catatan evaluasi program. Proses pengumpulan data dilakukan secara triangulasi untuk memastikan keabsahan dan reliabilitas (Fusch, Fusch, & Ness, 2021).

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2020) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memahami dinamika pengelolaan dana BOSP secara holistik. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, member checking kepada informan kunci, serta diskusi sejawat (Nowell, Norris, White, & Moules, 2019).

Aspek etika penelitian dijaga dengan memberikan penjelasan mengenai tujuan penelitian, meminta persetujuan (informed consent) dari informan, serta menjamin kerahasiaan identitas mereka. Penelitian ini mengacu pada prinsip etis penelitian sosial, yaitu menghargai hak partisipan, menjaga kerahasiaan, dan memastikan manfaat penelitian bagi penguatan pendidikan nonformal (Tracy, 2020).

HASIL PENELITIAN

Inovasi Program Literasi Kewargaan

PKBM Sabilillah Malang, sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang aktif di Jawa Timur, telah melakukan inovasi dalam pengembangan modul pembelajaran kewargaan berbasis isu-isu lokal. Materi yang dikembangkan mencakup topik toleransi antaragama, etika digital, serta strategi penanggulangan hoaks. Pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) diarahkan untuk mendukung pelatihan tutor dan produksi media pembelajaran berbasis konteks sosial masyarakat. Strategi ini memungkinkan proses pembelajaran menjadi lebih relevan

dengan kebutuhan warga belajar, sehingga tidak berhenti pada aspek teoritis, melainkan terhubung dengan praktik kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kewargaan yang dikaitkan dengan isu aktual memberikan dampak signifikan terhadap kesadaran kritis warga belajar. Sejalan dengan pendapat Fitriani dan Yusran (2024), pendidikan kewargaan yang mengaitkan materi dengan realitas sosial mampu membentuk partisipasi aktif dalam masyarakat. Hal ini juga didukung oleh laporan UNESCO (2023), yang menekankan pentingnya literasi kewargaan berbasis demokrasi, hak asasi manusia, dan kemampuan reflektif untuk memperkuat partisipasi publik.

Jika dibandingkan dengan penelitian Rahayu (2022), yang menemukan bahwa penggunaan isu aktual dalam pembelajaran PKBM di Yogyakarta mampu meningkatkan kesadaran toleransi sosial, maka strategi PKBM Sabilillah memperlihatkan konsistensi hasil di konteks berbeda. Namun, inovasi di Malang lebih menekankan pada integrasi isu digital, seperti etika bermedia sosial dan literasi informasi, yang belum banyak dieksplorasi dalam studi terdahulu. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan literasi kewargaan dalam ranah pendidikan nonformal dengan memasukkan dimensi literasi digital.

Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan temuan Widodo dan Astuti (2021) bahwa pendidikan kewargaan dalam lembaga nonformal perlu mengintegrasikan pendekatan multikultural untuk menjawab tantangan keberagaman sosial. Pengembangan modul yang menekankan toleransi antaragama di PKBM Sabilillah menunjukkan implementasi nyata dari pendekatan tersebut. Selanjutnya, Fauzi (2023) menegaskan bahwa pembelajaran berbasis komunitas dapat meningkatkan solidaritas sosial dan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap disinformasi. Hal ini relevan dengan inovasi PKBM Sabilillah yang mengaitkan literasi kewargaan dengan isu hoaks di era digital.

Dengan demikian, inovasi literasi kewargaan yang dilakukan PKBM Sabilillah tidak hanya mengonfirmasi hasil penelitian terdahulu, tetapi juga memberikan kontribusi baru dengan menambahkan aspek literasi digital sebagai bagian dari penguatan kapasitas kewargaan. Hal ini memperlihatkan bahwa optimalisasi BOSP dalam pendidikan nonformal dapat diarahkan tidak hanya pada peningkatan akses,

tetapi juga pada pengembangan kurikulum yang kontekstual, inklusif, dan responsif terhadap perubahan sosial.

Peningkatan Partisipasi Melalui Dana BOSP

PKBM Banyuwangi Mandiri, yang berlokasi di Kecamatan Giri, Kabupaten Banyuwangi, menunjukkan praktik baik dalam memanfaatkan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) untuk memperkuat literasi kewargaan. Program yang dikembangkan meliputi pelatihan demokrasi desa dan simulasi pemilu, yang tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran, tetapi juga sebagai sarana membangun kesadaran politik dan keterlibatan sosial warga belajar. Kegiatan ini terbukti meningkatkan partisipasi warga dalam musyawarah desa serta memperkuat pemahaman tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam kehidupan publik.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Hasan dan Ningsih (2023), bahwa pendidikan berbasis partisipasi mendorong masyarakat untuk memiliki kesadaran kritis terhadap proses demokrasi. Hal ini juga diperkuat oleh Galston (2020), yang menyatakan bahwa simulasi demokrasi lokal merupakan instrumen efektif untuk membentuk karakter kewargaan yang bertanggung jawab dan memperkuat kohesi sosial.

Jika dibandingkan dengan penelitian Prasetyo (2021), yang meneliti program simulasi musyawarah desa di PKBM Yogyakarta, terlihat bahwa pola pendidikan berbasis praktik demokrasi dapat meningkatkan rasa percaya diri warga belajar dalam berpendapat dan mengambil keputusan kolektif. Namun, penelitian Prasetyo lebih menekankan aspek deliberasi, sementara PKBM Banyuwangi Mandiri mengintegrasikan simulasi dengan agenda nyata desa, sehingga dampaknya lebih aplikatif.

Selain itu, studi Utami dan Rachman (2022) menemukan bahwa pelibatan warga belajar dalam forum desa mampu memperluas ruang partisipasi politik, terutama bagi kelompok marginal. Hasil ini konsisten dengan praktik di Banyuwangi, di mana warga belajar perempuan dan pekerja informal ikut terlibat aktif dalam musyawarah desa setelah mengikuti program pelatihan. Penelitian lain oleh Latifah (2020) juga menegaskan bahwa keterlibatan langsung warga dalam simulasi demokrasi meningkatkan literasi politik serta membangun kepercayaan terhadap lembaga lokal.

Dengan demikian, inovasi PKBM Banyuwangi Mandiri menunjukkan bahwa BOSP bukan hanya instrumen finansial, tetapi juga sarana strategis untuk memperluas partisipasi warga dalam ruang publik. Hal ini memperlihatkan bahwa pendidikan nonformal dapat menjadi motor penggerak demokratisasi desa apabila didukung dengan program berbasis kebutuhan masyarakat dan pengelolaan dana yang transparan.

Transparansi dan Kepercayaan Publik

PKBM Sidoarjo Jaya, yang berlokasi di Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, menunjukkan praktik baik dalam penerapan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Laporan penggunaan dana dipublikasikan secara rutin melalui papan informasi publik, forum warga belajar, dan grup diskusi daring berbasis WhatsApp. Langkah ini tidak hanya memberikan akses informasi kepada masyarakat, tetapi juga menjadi sarana dialog terbuka antara pengelola dan warga belajar mengenai prioritas penggunaan dana.

Temuan ini sejalan dengan pandangan Wulandari dan Firmansyah (2022) bahwa keterbukaan laporan keuangan di lembaga pendidikan nonformal memperkuat rasa memiliki masyarakat sekaligus dukungan sosial bagi keberlangsungan program. Selain itu, Fung (2021) menekankan bahwa transparansi merupakan fondasi tata kelola demokratis, di mana masyarakat tidak hanya sebagai penerima manfaat, tetapi juga pengawas aktif dalam pengelolaan dana publik.

Jika dibandingkan dengan studi Handayani (2022), yang menemukan bahwa keterbukaan informasi di PKBM Jawa Tengah mendorong partisipasi warga dalam forum evaluasi program, maka praktik PKBM Sidoarjo Jaya memperlihatkan bentuk yang lebih adaptif melalui pemanfaatan media digital. Hal ini menunjukkan adanya inovasi dalam strategi transparansi yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi.

Lebih lanjut, penelitian Nugraha (2020) menegaskan bahwa transparansi publik dalam lembaga pendidikan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperkuat legitimasi kelembagaan. Hasil ini diperkuat oleh studi Hidayati dan Putra (2021), yang menemukan bahwa keterlibatan warga dalam pengawasan anggaran mendorong terciptanya hubungan lebih setara antara pengelola lembaga dan komunitas. Praktik yang diterapkan PKBM Sidoarjo Jaya konsisten dengan temuan tersebut, di mana

keterbukaan informasi tidak hanya berfungsi administratif, tetapi juga memperkuat demokratisasi dalam pengelolaan lembaga nonformal.

Dengan demikian, transparansi dalam pengelolaan BOSP di PKBM Sidoarjo Jaya tidak hanya meningkatkan akuntabilitas finansial, tetapi juga berkontribusi pada penguatan kepercayaan publik, partisipasi komunitas, dan kohesi sosial. Praktik ini dapat menjadi model replikasi bagi PKBM lain di Jawa Timur maupun wilayah lain di Indonesia.

Kendala dan Tantangan

PKBM Jember Cerdas, yang berlokasi di Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, menghadapi sejumlah kendala dalam pengelolaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP). Tantangan utama meliputi keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah serta minimnya pelatihan bagi tutor. Kedua faktor ini berdampak langsung pada keberlangsungan program kesetaraan dan literasi kewargaan, terutama dalam menjaga konsistensi kualitas layanan pendidikan.

Temuan ini sejalan dengan pendapat Nurhidayah dan Saputra (2023) yang menekankan bahwa keberlanjutan program pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh sistem pelaporan keuangan yang akuntabel. Tanpa sistem pelaporan yang transparan, kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan nonformal cenderung melemah. Selain itu, Hill dan Varghese (2022) menegaskan bahwa kelemahan dalam kapasitas kelembagaan, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, menghambat efektivitas manajemen dana publik.

Studi tambahan mendukung hal ini. Penelitian Susanti dan Kadir (2020) menemukan bahwa keterlambatan pencairan dana operasional di PKBM Sulawesi Selatan menyebabkan terhentinya beberapa program pembelajaran, sehingga menurunkan motivasi warga belajar. Hal serupa juga diungkap oleh Pramono (2021), bahwa rendahnya kompetensi tutor dalam manajemen kelas dan administrasi program memperburuk efektivitas pelaksanaan literasi kewargaan.

Selain itu, studi Handoko dan Pratiwi (2022) menyoroti pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk mengatasi kendala struktural di PKBM. Mereka menekankan bahwa tanpa dukungan lintas sektor, lembaga nonformal akan kesulitan menjalankan prinsip transparansi dan partisipasi dalam pengelolaan dana publik. Sementara itu, penelitian Lestari (2019) mengungkap bahwa keterbatasan

kapasitas tutor dapat diatasi dengan program pengembangan kompetensi berkelanjutan berbasis komunitas.

Dengan demikian, kasus PKBM Jember Cerdas menegaskan bahwa tantangan pengelolaan BOSP tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pencairan dana, tetapi juga menyangkut aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, serta lemahnya sinergi antar pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan strategi penguatan kapasitas tutor, percepatan pencairan dana, serta penguatan sistem tata kelola berbasis kolaborasi agar program literasi kewargaan dapat berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) di PKBM Jawa Timur berkontribusi nyata terhadap penguatan literasi kewargaan apabila dikelola secara partisipatif, transparan, dan berbasis kebutuhan lokal. Inovasi pembelajaran berbasis isu aktual, pelibatan warga belajar dalam perencanaan program, serta keterbukaan laporan keuangan terbukti menjadi faktor utama yang meningkatkan kesadaran kritis dan partisipasi masyarakat dalam kehidupan publik.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah kendala, seperti keterbatasan kapasitas tutor, keterlambatan pencairan dana, dan lemahnya sistem pelaporan keuangan. Tantangan ini berdampak langsung pada keberlanjutan program literasi kewargaan, sehingga diperlukan strategi penguatan kelembagaan, percepatan mekanisme pencairan dana, serta peningkatan kompetensi tutor melalui pelatihan berkelanjutan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat konsep pemberdayaan komunitas dalam pendidikan nonformal dengan menegaskan bahwa pengelolaan dana publik yang transparan dan partisipatif mampu memperkuat kohesi sosial dan legitimasi kelembagaan. Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah, PKBM, dan masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pengelolaan dana pendidikan, sehingga BOSP dapat menjadi instrumen strategis untuk mewujudkan pendidikan kewargaan yang inklusif, demokratis, dan berkelanjutan.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian kuantitatif atau mixed methods untuk mengukur secara lebih objektif sejauh mana BOSP berpengaruh

terhadap peningkatan literasi kewargaan. Selain itu, penelitian komparatif antarprovinsi juga penting dilakukan guna memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas program ini di berbagai konteks sosial dan budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. (2020). *Diversity and citizenship education: Global perspectives*. John Wiley & Sons.
- Biesta, G. (2020). *Good education in an age of measurement: Ethics, politics, democracy*. Routledge.
- Craig, D., & Porter, D. (2021). *Development beyond neoliberalism? Governance, poverty reduction and political economy*. Routledge.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2019). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Fauzi, A. (2023). Pendidikan kewargaan berbasis komunitas dalam memperkuat solidaritas sosial. *Jurnal Pendidikan Sosial*, 9(2), 115–127.
- Fitriani, R., & Yusran, H. (2024). Strategi kontekstual dalam literasi kewargaan. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 6(1), 94–101.
- Fung, A. (2021). *Empowered participation: Reinventing urban democracy*. Princeton University Press.
- Galston, W. A. (2020). Civic education and political participation. *Journal of Democracy*, 31(3), 137–147.
- Guest, G., Namey, E., & Chen, M. (2020). A simple method to assess and report thematic saturation in qualitative research. *PLoS ONE*, 15(5), 1–17.
- Handayani, S. (2022). Tata kelola partisipatif dalam pendidikan nonformal: Studi kasus PKBM di Jawa Tengah. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 16(1), 54–62.
- Handoko, Y., & Pratiwi, D. (2022). Kolaborasi pemerintah dan komunitas dalam penguatan pendidikan nonformal. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 10(2), 144–156.
- Hartono, A., & Azizah, N. (2022). Literasi kewargaan dalam pendidikan nonformal. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 5(2), 64–73.
- Hasan, R., & Ningsih, D. (2023). Pendidikan partisipatif dan kesadaran kritis masyarakat. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 7(2), 101–110.
- Hidayati, N., & Putra, R. (2021). Transparansi anggaran dan partisipasi warga dalam pendidikan masyarakat. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 5(2), 66–74.
- Hill, C., & Varghese, N. V. (2022). Improving institutional capacities in non-formal education. *International Journal of Educational Development*, 90, 113–125.
- Hoskins, B., & Kerr, D. (2021). Participatory citizenship education in Europe. *European Journal of Education*, 56(2), 239–256.
- Kemendikbudristek. (2023). *Petunjuk teknis BOSP pendidikan kesetaraan 2023*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia.
- Kurniawan, D. (2023). Efektivitas pengelolaan dana pendidikan berbasis kebutuhan lokal. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 7(1), 33–41.
- Latifah, S. (2020). Simulasi demokrasi sebagai sarana peningkatan literasi politik warga belajar. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 6(2), 77–85.
- Latifah, A., & Wijaya, R. (2021). Partisipasi komunitas dalam pengelolaan dana pendidikan. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 15(1), 63–70.

- Lestari, S. (2019). Pengembangan kapasitas tutor dalam pendidikan nonformal berbasis komunitas. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 6(1), 11–20.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). Sage Publications.
- Mulyani, R., & Hidayat, A. (2021). Transparansi pengelolaan dana operasional dalam pendidikan nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Pemberdayaan*, 5(2), 87–95.
- Nowell, L. S., Norris, J. M., White, D. E., & Moules, N. J. (2019). Thematic analysis: Striving to meet the trustworthiness criteria. *International Journal of Qualitative Methods*, 18, 1–13.
- Nugraha, B. (2020). Transparansi publik dan legitimasi lembaga pendidikan nonformal. *Jurnal Pendidikan dan Kebijakan Publik*, 12(3), 211–220.
- Nugroho, S., & Yuniarti, F. (2022). Dana pendidikan dan peningkatan kapasitas kelembagaan nonformal. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 28(3), 201–210.
- Nurhidayah, S., & Saputra, D. (2023). Akuntabilitas lembaga pendidikan nonformal dalam pengelolaan dana publik. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 6(1), 49–58.
- Pramono, A. (2021). Kompetensi tutor dan efektivitas pembelajaran kewargaan di PKBM. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 7(2), 82–90.
- Prasetyo, B., & Anisa, M. (2020). Literasi kewargaan dalam konteks pendidikan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 6(2), 89–97.
- Prasetyo, T. (2021). Deliberasi warga dalam pendidikan nonformal: Studi kasus simulasi musyawarah desa di Yogyakarta. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 8(1), 45–54.
- Psacharopoulos, G., & Patrinos, H. A. (2020). Returns to investment in education: A global update. *World Bank Policy Research Working Paper*, 9409.
- Putri, L., & Darmawan, A. (2023). Kolaborasi multipihak dalam pemberdayaan pendidikan nonformal. *Jurnal Pengembangan Masyarakat*, 11(1), 45–56.
- Rahman, A., & Sulastri, I. (2021). Pengelolaan dana publik pada pendidikan nonformal. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 5(2), 66–75.
- Rahayu, N. (2022). Literasi kewargaan berbasis isu aktual di PKBM. *Jurnal Pendidikan Nonformal*, 8(2), 73–82.
- Ravitch, D., & Carl, J. (2021). *The death and life of the great American school system: How testing and choice are undermining education*. Basic Books.
- Santoso, H., & Herlina, R. (2022). Inklusi sosial dalam pendidikan nonformal. *Jurnal Pemberdayaan Komunitas*, 4(1), 109–116.
- Siregar, H., & Lubis, M. (2020). Partisipasi komunitas dalam perencanaan program pendidikan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Masyarakat*, 4(1), 50–59.
- Supriyanto, B., & Rachmawati, I. (2021). Tantangan tata kelola PKBM dalam pemanfaatan dana BOSP. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 7(1), 57–65.
- Susanti, E., & Kadir, A. (2020). Keterlambatan pencairan dana operasional dan dampaknya pada keberlanjutan program PKBM. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 14(3), 201–210.
- Tracy, S. J. (2020). *Qualitative research methods: Collecting evidence, crafting analysis, communicating impact* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- UNESCO. (2023). *Global education monitoring report 2023: Citizenship education for sustainable societies*. UNESCO.
- UNESCO Institute for Lifelong Learning. (2022). *Community-based education and financial governance*. UNESCO.

- Utami, R. (2021). Pemberdayaan komunitas dalam pengelolaan lembaga pendidikan nonformal. *Jurnal Pemberdayaan Sosial*, 3(2), 99–108.
- Utami, R., & Rachman, A. (2022). Literasi politik warga belajar melalui forum desa. *Jurnal Kebijakan Pendidikan*, 17(1), 33–42.
- Widodo, T., & Astuti, D. (2021). Literasi kewargaan multikultural dalam pendidikan nonformal. *Jurnal Pendidikan Karakter*, 12(1), 21–33.
- Wulandari, A., & Firmansyah, M. (2022). Transparansi keuangan dalam pendidikan nonformal. *Jurnal Tata Kelola Pendidikan*, 3(2), 77–84.
- Zimmerman, M. A. (2020). Empowerment theory. In J. Rappaport & E. Seidman (Eds.), *Handbook of community psychology* (pp. 43–63). Springer.